

**PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**RISMAWATI
NIM : 15622178**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

**NAMA : RISMAWATI
NIM : 15622178**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang


Oleh

NAMA : Rismawati

NIM : 15622178

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Salihi, S.E., M.Ak.

NIDK. 8823501019/Asisten Ahli

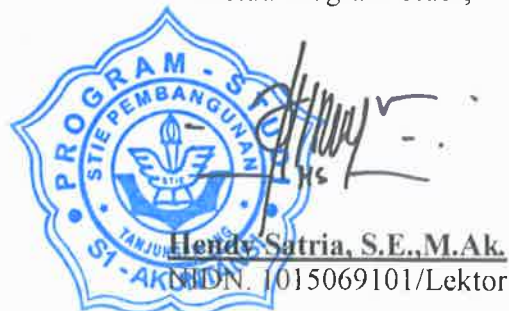
Pembimbing Kedua,



Fauzi, S.E., M.Ak.

NIDK. 8928410021

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDK. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul
PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Nama : Rismawati

NIM : 15622178

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh
Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan Dinyatakan Telah Menenuhi Syarat
Untuk Diterima.

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Salihi, SE., M.Ak.
NIDK. 8823501019 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Masyitah As Sahara, S.E., M.Si.
NIDN. 1010109101 / Lektor

Anggota,



Fauzi, S.E., M.Ak.
NIDK. 8928410021 / Tanpa Jabatan

Tanjungpinang, 20 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismawati
NIM : 15622178
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.23
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1
Judul Skripsi : Pengaruh Penatausahaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Agustus 2022

Penyusun



RISMAWATI

NIM : 15622178

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas kasih sayang dan karunianya telah memberikan kesempatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang tua ku tersayang, yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, beserta doa kepada penulis sehingga penulis dapat melewati masa perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membuat seluruh keluarga bahagia.

Kuucapkan terima kasih kepada kakak-kakakku tersayang yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kuucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku Annisa Putri dan Sufiandy Elmy, ST yang selalu memberi dukungan dan menjadi penghibur dalam suka duka pengerjaan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungannya.

MOTTO

“Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

“Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah”

(Thomas A. Edison)

“We do not need magic to change the world, we carry all the power we need inside ourselves already : we have the power to imagine better”

(J.K. Rowling)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Penulis Ucapkan atas nikmat kesehatan yang diberikan Tuhan dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi yang berjudul : **“PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**.

Penulisan skripsi ini tentunya merupakan proses dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga yaitu kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M.selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak Salihi, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing I yang selama ini sudah banyak membantu memberikan masukan dan perbaikan selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Fauzi, S.E., M.Ak. selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen pengajar dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis. Kritik dan saran pun yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang membacanya.

Tanjungpinang, Juli 2022

Penulis

Rismawati

NIM : 15622178

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Kegunaan Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Teori	8
2.1.1 Laporan Keuangan	8
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
2.1.3 Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	18
2.1.4 Penatausahaan Aset Daerah	22
2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.3 Hipotesis.....	26

2.3	Penelitian Terdahulu	26
BAB III. METODE PENELITIAN		30
3.1.	Jenis Penelitian.....	30
3.2.	Jenis Data	30
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	31
3.4.	Populasi dan sampel.....	32
3.5.	Definisi Operasional Variabel	34
3.6.	Teknik Analisa Data	35
3.7	Teknik Pengolahan Data	36
3.7.	Jadwal Penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Hasil Penelitian	44
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.2	Gambaran Umum Responden	45
4.1.3	Uji Kualitas Data (Instrumen Penelitian).....	47
4.1.4	Deskripsi Jawaban Responden.....	49
4.1.5	Uji Asumsi Klasik.....	55
4.1.6	Analisis Regresi Linier Sederhana.....	58
4.1.7	Uji Hipotesis	60
4.1.8	Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	61
BAB V PENUTUP.....		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
CURRICULUM VITAE		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Daftar SKPD Provinsi Kepulauan Riau	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Pengujian Validitas Variabel Penelitian	48
Tabel 4.2 Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian.....	49
Tabel 4.3 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Penatausahaan aset daerah....	50
Tabel 4.4 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kualitas laporan keuangan ...	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.6 Analisa Perhitungan Regresi.....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	60
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Untuk Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambat 2.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 3.1 Grafik Histogram	38
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	46
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	47
Gambar 4.4 Hasil Pengujian Normalitas dengan Histogram	55
Gambar 4.5 Uji Normalitas dengan Grafik P-P Plot.....	56
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisisioner
- Lampiran 2 Hasil Output SPSS
- Lampiran 3 Hasil Plagiarism Turnitin

A B S T R A K

PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rismawati. 15622178.

Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tujuan penelitian ini adalah pengaruh penatausahaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Ria. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Adapun teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menganalisis data sampel dan hasilnya akan diberlakukan untuk populasi. Menurut Sugiyono (2016) dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

Berdasarkan dari pengujian yang dilakukan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui Penatausahaan aset daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tentunya memberikan indikasi bahwa meningkatnya penatausahaan aset daerah akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Persentase pengaruh yang diberikan oleh penatausahaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan hasil pengolahan data dengan nilai r square yaitu sebesar 77,9%, sedangkan sisanya sebesar 22,1% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. .

Kata Kunci : Penatausahaan Aset Daerah, Laporan Keuangan

Dosen Pembimbing I : Salihi, S.E, M.Ak

Dosen Pembimbing II : Fauzi, S.E, M.Ak

A B S T R A C T

THE EFFECT OF REGIONAL ASSETS ADMINISTRATION ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS OF THE RIAU ISLANDS PROVINCE GOVERNMENT

Rismawati. 15622178.

Accountancy. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.

The purpose of this study is the effect of regional asset administration on the quality of the financial statements of the Ria Islands Provincial Government. The method used in this study is a quantitative method.

The analysis technique used to determine the effect of the independent variable on the dependent variable is to analyze the sample data and the results will be applied to the population. According to Sugiyono (2016) descriptive statistics can also be used to find the strength of the relationship between variables through correlation analysis, make predictions with regression analysis, and make comparisons by comparing the average sample or population data.

Based on the tests conducted on the results of research and discussion, it can be seen that regional asset administration has a positive and significant influence on the quality of financial reports. This certainly gives an indication that the increase in regional asset administration will have a significant effect on improving the quality of the Riau Islands Provincial Government's financial reports.

The percentage of influence given by the administration of regional assets on the quality of financial reports based on the results of data processing with an r-square value is 77.9%, while the remaining 22.1% is influenced by other factors not examined in this study. .

Keywords: Regional Asset Administration, Financial Report

Lecturer of Supervisor I : Salihi, S.E, M.Ak

Lecturer of Supervisor II : Fauzi, S.E, M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era reformasi ini, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang baik. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Pemerintah Republik Indonesia (2010) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk menghasilkan laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan diperlukan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, bebas dari salah saji material dan bebas dari pengertian yang menyesatkan. Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya

manusia pada suatu instansi memiliki nilai tinggi yang disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah sebagai satu kesatuan. Pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran yang tidak kalah penting, karena kinerja pemerintah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat akan berjalan baik dan lancar ketika keuangan dan aset daerah dikelola dengan baik, transparansi, dan profesional. Menurut Yusuf (2015) pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, selain itu pengelolaan aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik.

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdaya guna dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan aset daerah (Mendagri, 2016) dimana dalam penatausahaan aset daerah upaya pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama

pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Seperti kutipan radarkepri.com Rabu, Juli 15th, 2020 dimana ratusan miliar Barang Milik Daerah (aset) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikelola dan dimanfaatkan belum sesuai ketentuan. Sehingga berpotensi menjadi sengketa bahkan hilang yang menjadi bukti lemahnya kinerja dinas terkait.

Fenomena permasalahan terkait penatausahaan aset daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pengamatan sementara dari media dimana masih terdapat aset yang belum jelas pengelolaannya termasuk kepemilikannya sehingga bertahun-tahun tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Berdasarkan dari data yang didapatkan dapat diketahui dalam LHP TA 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyajikan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.757.725.332.145,42 (*audited*), naik sebesar Rp. 759.176.248.120,86 atau 10,85% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.998.549.084.024,56. Berdasarkan Catatan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pengelolaan Aset Tetap pada

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Aset Tanah Sebanyak 304 Persil Senilai Rp410.870.401.499,50 Belum Memiliki Bukti Kepemilikan. Laporan Hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, menunjukkan terdapat Aset Tanah Eks Provinsi Riau sebanyak 90 persil dengan nilai sebesar Rp117.814.290.382,83 yang belum dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan. Penelaahan lebih lanjut terhadap Kartu Inventaris Barang (KIB) A, menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 304 persil tanah dengan nilai sebesar Rp410.870.401.499,50 atau sebesar 46,22% ($\text{Rp}410.870.401.499,50 \div 888.989.046.325,68$) dari keseluruhan nilai tanah yang dicatat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dilengkapi dengan sertifikat.
2. Aset Tanah Bidang Jalan Belum Seluruhnya Dicatat Dalam Neraca Penelaahan pada KIB A menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mencatat Aset Tanah atas 17 ruas jalan dengan nilai sebesar Rp 427.339.550.000,00, seluruhnya berada di wilayah Kota Tanjungpinang. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1863 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau Jalan Provinsi, menunjukkan bahwa terdapat 115 ruas jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 98 (115-17) bidang tanah ruas jalan yang belum dicatat di dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau. Usulan koreksi tidak dapat dilakukan mengingat surat keputusan tersebut tidak mencantumkan nilai asetnya.

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Aset daerah tentunya akan menjadi bermanfaat ketika pengelolaan dilakukan berdasarkan pada prinsip penatausahaan aset daerah yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan serta efisiensi dan efektif, dan adanya pengawasan Mardiasmo dalam Puspitoarum (2016). Penatausahaan aset daerah yang baik tentunya akan menjadi salah satu variabel yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah, dimana hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poae (2017) dan Anshari (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penatausahaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Riau masih banyak disajikan data data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan. Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

yang baik (*Good Governance*) meningkat. Hal ini juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntansi publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat diambil suatu judul penelitian **“PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah “Apakah penatausahaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penatausahaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam hal penatausahaan aset daerah.

2. Kegunaan Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mengetahui bagaimana penatausahaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kegunaan Ilmiah

Menyajikan hasil empiris pengaruh penatausahaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan serta sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini terbagi dalam tiga bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori yang berisi teori-teori yang menunjang penelitian yang berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Sofyan (2013) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Fahmi (2015) laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) mengemukakan bahwa: “Pengertian laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*), dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya”.

Bastian Indra (2014) menyatakan bahwa: “Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan”. Sementara menurut Mahmudi (2015) menyatakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik,

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information content*). Laporan keuangan akan berguna (*useful*) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Kusufi, 2013).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Pemerintah Republik Indonesia (2010) dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 9 sebagaimana menurut Pemerintah Republik Indonesia (2010) yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka memenuhi seluruh informasi yang diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki diperlukan ukuran normatif. Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator menurut Mardiasmo (2018) antara lain:

1. Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan, yaitu merupakan salah satu unsur prasyarat normatif pelaporan keuangan, yaitu relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yakni informasi dalam

laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*), yakni informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2. Ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan bermanfaat jika disampaikan secara tepat waktu kepada pemakainya, informasi yang tepat waktu akan memiliki nilai dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
3. Kelengkapan informasi yang disajikan, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi utama termuat dengan jelas agar mencegah kekeliruan dalam penggunaan informasi. Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kesulitan karena bagian informasi yang tidak dicantumkan bisa saja merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan itu sendiri.
4. Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntansi pemerintah harus disajikan secara jujur, yaitu menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan,

maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

5. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Ada dua cara untuk memverifikasi laporan keuangan, secara langsung dan tidak langsung.
6. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
7. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pengguna harus memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas akuntansi dan pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019) dijelaskan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019) dapat diketahui uraian penjelasan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penJrusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan

pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Sejalan dengan yang pendapat disampaikan pada penelitian Mbipi, Assih, & Sumtaky (2021) Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang didalamnya mencakup; perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. keuangan daerah pada intinya mencakup dua hal, yaitu Hak Daerah dan Kewajiban Daerah. Hak daerah ialah segala hal yang secara hukum merupakan milik daerah dan dapat dijadikan sebagai milik pemerintah. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan. Jika hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang,

maka hal tersebut telah dapat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah.

Menurut Sholeh dan Rochmansyah (2014), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
4. Transparansi
5. Pengendalian

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
3. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
4. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi berupa laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik.

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sedangkan menurut Abdul (2012) mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Tanggungjawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna
5. Pengendalian

Pendapatan daerah menurut Pemerintah Republik Indonesia (2019) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
 - d. Lain-Lain PAD Yang Sah, yang terdiri dari :
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil kerja sama daerah;
- d) Jasa giro;
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) Pendapatan bunga;
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) Pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) Pendapatan dari pengembalian;
- o) Pendapatan dari BLUD; dan
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:
 - 1) Dana perimbangan;
 - 2) Dana insentif daerah;
 - 3) Dana otonomi khusus;
 - 4) Dana keistimewaan; dan
 - 5) Dana desa.
- b. Transfer antar-daerah, terdiri atas:
 - 1) Pendapatan bagi hasil; dan
 - 2) Bantuan keuangan.

2.1.3 Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Pejabat Pengelola Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota.

Untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2018) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni :

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya

2. Pelaksanaan

Apabila sudah dibuat perencanaan yang tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut masalah pendistribusian, pengamanan, dan perawatan.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

Dalam akuntansi pemerintahan, Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut Rochmansjah dan Sholeh (2014) Pemegang kekuasaan penatausahaan aset daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dimana pemegang kekuasaan penatausahaan aset daerah berwenang dan bertanggungjawab untuk :

1. Menetapkan kebijakan penatausahaan aset daerah.
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
3. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
4. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah.

Azaz dalam penatausahaan aset daerah menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut :

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penatausahaan aset daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa

Pengguna Barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing;

2. Azas kepastian hukum, yaitu penatausahaan aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan penatausahaan aset daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu penatausahaan aset daerah diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penatausahaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu penatausahaan aset daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Penatausahaan aset daerah dalam penelitian ini adalah terlaksananya proses penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan pedoman teknis penatausahaan aset daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan aset daerah. Dimana menurut Mendagri (2016) indikator untuk mengukur Penatausahaan aset daerah adalah:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan dan pembinaan
11. Pengawasan dan pengendalian.

2.1.4 Penatausahaan Aset Daerah

Penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 No. 17 tahun 2007 lalu diperbarui dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris (KIB) dan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang serta sistem pelaporan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,

dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembukuan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang:
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kedalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Pada Pasal 474 dan 475 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembukuan adalah sebagai berikut :

- a. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi.
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- c. Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2).

- d. Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- e. Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Dalam Pasal 476 dan 477 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang inventarisasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun;
- c. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- d. Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Cara Penatausahaan yang ke 3 (tiga) adalah Pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 478 dan 479 menyebutkan bahwa :

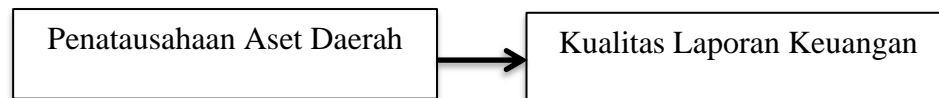
- a. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang;
- b. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan;
- c. Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang.
- e. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan;
- f. Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah;
- g. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/Daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian permasalahan maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang disesuaikan dengan penelitian, 2021

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi sementara dalam penelitian maka dapat diketahui hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : adanya pengaruh Penatausahaan aset daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4 Penelitian Terdahulu

Eliana (2017) Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan barang milik negara terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan studi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatip, yaitu hubungan atau pengaruh variable penata usahan barang milik negara dengan variabel kualitas laporan keuangan populasi penelitian ini sebanyak 37 orang responden, dengan

menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penata Usahaan Barang Milik Aceh berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan studi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Wini Widiati (2021). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. Penerapan penatausahaan aset tetap pada SKPD di wilayah Kabupaten Bandung sudah dilakukan dengan baik. Hal ini didukung pada hasil kuesioner tentang proses penatausahaan aset tetap yang sudah mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan analisis data yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga H_a diterima sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah pengaruh yang positif. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penatausahaan aset tetap maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Tingkat pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 57,4%.

Poae (2017). Pengaruh Penatausahaan aset daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penatausahaan aset daerah (BMD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Variabel-variabel yang digunakan adalah perencanaan, penilaian, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian BMD. Dengan menggunakan

metode *purposive sampling*, jumlah sampel penelitian yang diambil sebanyak 158 responden. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penilaian, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan perencanaan BMD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian BMD bersama-sama berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 36,5%, sisanya 63,5 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Erlina, (2018) *Determinant Analysis Of The Quality Of Local Government Financial Statements In North Sumatra With The Effectiveness Of Management Of Regional Property As A Mediator*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan efektivitas pengelolaan properti daerah sebagai mediator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukti kepemilikan dan penilaian aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila efektivitas pengelolaan BMD digunakan sebagai mediator maka hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen

berpengaruh positif terhadap mediasi dan mediasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jatmiko, Irawan, Machmuddah, & Laras (2020) *Factors Affecting Regional Government Financial Statements : Evidence from Indonesia*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah masih belum merata, dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah masih kurang. Standar belum diterapkan secara konsisten. Metode penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dengan sampel sebanyak 40 SKPD, dan penentuan sampel berdasarkan *purposive sampling* dengan kriteria pejabat masing-masing SKPD yang memiliki kewenangan pencatatan, penyusunan, dan pelaporan. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data menggunakan SPSS 25. Metode yang digunakan adalah uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi

Informasi, dan Pengawasan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini dijelaskan menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut, jawaban terhadap masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis yang diartikan sebagai jawaban sementara masalah penelitian.

Variabel kuantitatif adalah variabel yang keadaannya dapat dinyatakan dalam bilangan, dan bilangan tersebut mempunyai arti. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan terbagi dalam dua kelompok yaitu data diskrit yaitu data yang diperoleh melalui hasil proses menghitung atau membilang dan data kontinu yaitu data yang diperoleh melalui proses mengukur.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung didapatkan dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui penyebaran kuesioner dengan pihak yang merupakan responden penelitian. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016) menjelaskan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini dalam penelitian ini merupakan data pendukung penelitian berupa data aset daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang akan digunakan saat melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Kuesioner, merupakan alat yang digunakan dalam penelitian berupa butir-butir pertanyaan yang disusun berdasarkan pertanyaan dari indikator variabel dengan beberapa *option* atau pilihan jawaban. Menurut Sugiyono (2016) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
2. Studi Pustaka, Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

2.4 Populasi dan Sampel

2.4.1 Populasi

Menurut pendapat Sugiyono (2016) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar SKPD Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama SKPD
1	Sekretariat DPRD
2	Sekretariat Daerah
3	Biro Organisasi dan KORPRI
4	Biro Umum
5	Biro Administrasi Pembangunan
6	Biro Layanan Pengadaan
7	Biro Administrasi Perekonomian
8	Biro Kesejahteraan Rakyat
9	Biro Hukum
10	Biro Pemerintahan dan Perbatasan
11	Biro Humas Protokol dan Penghubung
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
13	Badan Perencanaan dan Litbang
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
17	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
18	Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Inspektorat
22	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
23	Dinas Kebudayaan
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
26	Dinas Sosial
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama SKPD
28	Dinas Kelautan Perikanan
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31	Dinas Perhubungan
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
34	Dinas Kesehatan
35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
36	Dinas Pendidikan
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	Dinas Perumahan dan Pemukiman
39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
40	Dinas Pariwisata
41	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dalam penelitian ini populasinya adalah pengelola keuangan serta pengelola Barang Milik Daerah pada setiap SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 82 orang.

2.4.2 Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2016) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diwakili oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, maka akan ditetapkan dari populasi yang ada.

Selanjutnya dalam menentukan sampel, penelitian sampel diserahkan pada pertimbangan-pertimbangan pengumpulan data yang telah

diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Dapat diketahui sampel dalam penelitian ini yaitu pengelola keuangan serta pengelola Barang Milik Daerah pada setiap SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 82 orang.

2.5 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini dapat dijelaskan definisi variabel penelitian yang terdiri dari variabel X sebagai variabel independen, sedangkan definisi operasional variabel Y sebagai variabel dependen dapat diuraikan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Inikator Penelitian
Penatausahaan aset daerah (X)	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.	1. Pembukuan 2. Inventarisasi 3. Pelaporan Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Sumber : PP 71 Tahun 2010

	yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan	
--	---	--

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berdasarkan Variabel X (Penatausahaan aset daerah) dan Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan) dengan menggunakan teknik pengolahan data. Pengolahan data menurut (Misbahuddin & Hasan, 2013) meliputi kegiatan:

1. *Editing*. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.
2. *Coding* (Pengkodean). *Coding* adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.
3. Pemberian skor atau nilai dalam pemberian skor digunakan skala *Likert* yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Skala ini menggunakan 5 kategori:
 - a. Jawaban sangat baik diberi bobot 5
 - b. Jawaban baik diberi bobot 4
 - c. Jawaban cukup baik diberi bobot 3
 - d. Jawaban tidak baik diberi bobot 2
 - e. Jawaban sangat tidak baik diberi bobot 1

4. Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

3.7 Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menganalisis data sampel dan hasilnya akan diberlakukan untuk populasi. Menurut Sugiyono (2016) dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

Dapat dijelaskan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengolahan hasil pengumpulan data dengan SPSS versi 25 yang meliputi rangkaian pengujian sebagai berikut :

3.7.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk signifikansi 5% dari *degre of freedom* (df) = $n-2$, dalam

hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau andal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha (a)*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0.60.

3.7.2 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk meyakini bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi normalitas, heteroskedastitas, dan uji multikolinieritas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan pengujian berikut:

a. Uji Kolmogorov Smirnov

Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal
- 2) Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

b. Histogram

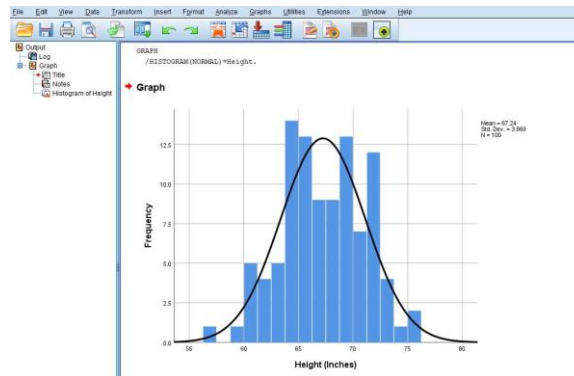
Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara normal. Grafik *Normality Probability Plot* merupakan hasil output regresi yang menggambarkan normalitas data dalam penelitian.

Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut merupakan contoh histogram penelitian dalam SPSS :

Gambar 3.1
Grafik Histogram



Sumber : <https://ezspss.com/how-to-make-a-histogram-in-spss/>, 2021

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Multikolinieritas dapat menyebabkan variabel-variabel independen menjelaskan varians yang sama dalam mengestimasi variabel dependen. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (dari output komputer program SPSS ver.25.0). Pedoman regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai $VIF < 10$ dan mempunyai angka *Tolerance* di atas 0,1

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung memengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji Durbin-Watson (*DW test*). Uji Durbin-Watson dilakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2 atau $DW < -2$
- b. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas 2 atau $DW > 2$.

5. Uji Regresi Sederhana

Analisis dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya. Menurut Sugiyono (2016) persamaan regresi dapat digunakan

untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel dependen dimanipulasi atau diubah-ubah. Analisis regresi sederhana digunakan sebagai alat untuk mengukur pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi sederhana yang digunakan dengan rumus analisis regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Harga Y bila X = 0 (Konstanta)

b = Angka arah atau koefisien regresi

X = Penatausahaan aset daerah

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji (Uji t)

Yaitu suatu uji digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t- hitung dengan t- tabel.

1. Penentuan Nilai Kritis (t- tabel)

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji – t dengan tingkat signifikan (x) 5%, dengan sampel (n).

2. Kriteria Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen

H_a : Ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen

Untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung $>$ t tabel H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen
2. Jika nilai t hitung $<$ t tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen

3.7.3.2 Koefisien Determinan (R^2)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X .

Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X . Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan

regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Menurut (Santoso, 2010), *Adjusted R square* adalah *R square* yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari *R square* dimana hal ini berarti untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *Adjusted R²* sebagai koefisien determinasi.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021			
		September	Oktober	November	Desember
1	Pengajuan Judul				
2	Proses Bimbingan				
3	Seminar Usulan Penelitian				
5	Perbaikan Hasil Seminar				
6	Proses Pengumpulan Data				
7	Proses Bimbingan Skripsi				
8	Sidang Skripsi				

Sumber : Data diolah, 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Anshari. (2016). Pengaruh Penatausahaan aset daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
- Bastian, Indra. 2014. Audit Sektor Publik, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina. (2018). Determinant Analysis Of The Quality Of Local Government Financial Statements In North Sumatra With The Effectiveness Of Management Of Regional Property As A Mediator.
- Fahmi, I. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Heru Rochmansjah dan Chabib Sholeh. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media.
- Ikatan Akuntansi indonesia. (2018). Standart Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI.
- Jatmiko, B., Irawan, D., Machmuddah, Z., & Laras, T. (2020). Factors Affecting Regional Government Financial Statements : Evidence from Indonesia. (32), 89–100.
- Kusufi, A. H. dan M. S. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik : Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. AFRE (Accounting and Financial Review), 3(2), 152–158.
- Mendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan aset daerah. , (2016).
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2013). Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi). Jakarta: Bumi Askara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Jakarta.
- Poae, Y. (2017). Pengaruh Penatausahaan aset daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Puspitoarum, M. A. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, 4, 229–241.
- Rusman. (2017). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh).
- Sofyan, H. (2013). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokus Media
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Widiati, W., Nugraha, A. A., & Novianty, I. (2021). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 253-260.
- Yusuf. (2015). Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

CURRICULUM VITAE



PROFIL

Nama : Rismawati
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 20 Desember 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : w.risma1996@gmail.com
Instagram : ianoonz__
Alamat : Perum. Griya Hangtuh Permai Blok E47
Pekerjaan : Bekerja

PENDIDIKAN

- SD Negeri 6 Tagaraja
- SMP Negeri 1 Kateman
- SMA Negeri 2 Tanjungpinang

PENGALAMAN KERJA

- Notaris & PPAT Desi Indriani, SH
- PT. Wajah Siba Nusantara